

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- . *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
- Aminuddin ilmar. “Hukum Administrasi Pemerintahan.” Kencana, n.d.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Evi Hartanti. “Tindak Pidana Korupsi,” n.d.
- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Hadjon, Philipus M. *Penegakan Hukum Administrasi Dalam Pemerintahan*. Surabaya: LaksBang Pressindo, 2007.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Press, 2019.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Kajian Sistem Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mohammad Djasuli. “Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa.” *Ikatan Akutan Indonesia Wilayah Jawatimur*.
- Mukfarah. “Pengawasan Dan Pembinaan Dana Desa Oleh Inspektorat.” Universitas Ar-Raniry, 22AD.
- Parsons, Talcott. *The Social System*. Glencoe: Free Press, 1951.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Rasyid, Ryaas. *Makna Pemerintahan: Tinjauan Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan*. Jakarta: Yarsif Watampone, 2011.
- Syafrudin, Ateng. *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih Dan Bertanggung Jawab*. Bandung: Pro Justitia, 2003.

Timur, Inspektorat Provinsi Jawa. *Hasil Supervisi Atas Penanganan Laporan/Pengaduan Masyarakat Berindikasi Penyalahgunaan Wewenang Dan/Atau Kerugian Keuangan Negara/Daerah*. Sidoarjo, 2024.

Jurnal

Abarang, S. “Sanksi Administrasi Dan Sanksi Pidana Bagi Perangkat Desa Dalam UU Desa.” *Lex Crimen* 8, no. 8 (2019): 83–100.

Adnan, Hasyim. “Implikasi Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Oleh Kepala Desa Terhadap Pemerintahan Desa.” *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* 7, no. 2 (2019): 45–56.

Adolph, Ralph. “Ralph Adolph, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Kudus” (2016).

Astariyani, Ni Luh Gede, Mariko Hattori, and Willy Naresta Hanum. “The Validity of Sanctions Arrangements in Regional Regulations.” *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 4, no. 3 (2024): 210–225.

Barus, Anjelina Ade Irma Suryani Br, Inri Januar, and Lonna Yohanes Lengkong. “Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Pada Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* spesial ed, no. 10 (2024): 106–124.

Beno, J, A.P Silen, and M Yanti. *Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. 33 Braz Dent J, 2022.

Dasuki, Hasan, Agustina Setiawan, and Rira Nuradhawati. “Pengaruh Pengawasan Inspektorat Daerah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Bandung Barat.” *Prinsip: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 11, no. 2 (2024): 90–104.
<https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip/article/view/3408> .

Djasuli, Mohammad. “Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Desa.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51, no. 1 (2023): 112–130.

Fatem, Thomas, and Moh. Ery Kusmiady. “Implementasi Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.” *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Administrasi Publik* 7, no. 1 (2024): 45–48.
<https://ejournal.unimudasorong.ac.id/index.php/JPPADAP/article/view/3751>.

Gunawan, Indra, Rini Pratiwi, and Ahmad Hidayat. “Gratifikasi Dalam Pengelolaan Proyek Desa.” *Jurnal Integritas Hukum* 5, no. 1 (2024): 33–47.

Handayani, I. G. A. K. Rachmi. “Peranan Sanksi Administrasi Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia.” *Pranata Hukum* 4, no. 2 (2016): 1–17.

Heryadi, and Sukmawan. “Kendala Penerapan Sanksi Administratif Pada Kasus Dana Desa.” *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 11, no. 2 (2023): 203–221.

- Heryadi, D., and D Sukmawan. "Optimizing Interagency Coordination and Supervision in Corruption Eradication Efforts." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 9, no. 2 (2023): 21–28. <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/download/945/244> .
- Hilmy, M. I. "Peran Inspektorat Memberikan Sanksi Administratif Dalam Pengawasan Keuangan Desa." *Supremasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 11, no. 2 (2021): 131–144.
- Maulidina, Sekha Anggita, Usep Saepuloh Zen, and Aji Mulyana. "Tinjauan Yuridis Peran Inspektorat Cianjur Dalam Pengawasan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (205AD): 55–70. <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/1802>.
- Nasrudin, Taufik, and Amrie Firmansyah. "Menutup Celah Korupsi: Evaluasi Pengawasan APIP Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Indonesia." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 24, no. 2 (2023): 155–170.
- Sahputra, Mirza, and Husniati. "Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terkait Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Transformasi Administrasi* 11, no. 1 (2020): 1–18.

Undang-Undang

- . *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*. Indonesia, 2014.
- . *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, 2014.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, 2001.

Website

- Anjani, Ajeng Kartika. "Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa." *Ombudsman Republik Indonesia*. Last modified 2019. Accessed October 12, 2025. <https://www.ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--pertanggungjawaban-pengelolaan-dana-desa>.
- Indra Gunawan, dkk. "Penyebab Kasus Tingginya Korupsi Dana Desa Dalam Sudut Pandang Teori Stuktural Fungsional Talcot Parson" (n.d.).
- Jum Anggriani. "Hukum Adminstrasi Negara." 1–23, 2016.
- PDTT, Humas Kemendes. *Terobosan Kemendes Dan KPK Untuk Tangani Pengaduan Dan Pencegahan Korupsi Di Desa*. Jakrta, n.d.

<https://dpmpd.landakkab.go.id/berita/detail/terobosan-kemendes-dan-kpk-untuk-tangani-pengaduan-dan-pencegahan-korupsi-di-desa>.

Polres Madiun. *Menteri Yandri Susanto Gandeng Penegak Hukum Awasi Dana Desa* (2025).

Timur, IAI Jawa. “Pengawasan Pemerintahan Desa Oleh Masyarakat: Pasal 82 UU Desa Dan Praktiknya.” *IAI Jawa Timur / Lembaga Studi Desa Dan Pemerintahan Desa*, 2022.

Yudi Kristiana. “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” n.d.